

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)

KABUPATEN PASAMAN BARAT



*Planning for Better Future*



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BAPPEDA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jl. Soekarno Hatta No. 5, Pasaman Baru - Simpang Empat Pasaman Barat

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 050/42/BAPPEDA/VII/2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA BAPPEDA**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021**

**KEPALA BAPPEDA**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Tahunan OPD yang selanjutnya disebut Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 tahun;

b. bahwa Rencana Kerja OPD disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif yang ditetapkan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala BAPPEDA.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
20. Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat Nomor No. 050/62/B.PER/IX/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : (1) Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan BAPPEDA untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2021;

(2) Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 10 Juli 2020

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Drs. JONI HENDRI, M.Si**  
**NIP. 19751007 19501 1 001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Agar pembangunan mencapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah peranannya semakin penting dalam memetakan potensi yang ada secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan, sehingga strategi yang dirumuskan melalui implementasi sistem perencanaan dapat dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan pedoman kerja bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selama satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada BAPPEDA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-

2021 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja juga merupakan bentuk jaminan terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan dan menjadi salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) BAPPEDA.

Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kerangka regulasi dan anggaran untuk periode satu tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Renja BAPPEDA Tahun 2021 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021. Sebagai OPD yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, dan Penelitian dan Pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah.

Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat disusun secara terpadu, partisipatif, demokratis yang dihasilkan melalui proses pemikiran strategis dalam menyikapi isu-isu yang berkembang untuk kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan OPD. Pada tahapan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

- 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
20. Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat Nomor No. 050/62/B.PER/IX/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja BAPPEDA serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada Tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun;
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, maupun Penelitian dan Pengembangan

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur kinerja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat
5. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renja BAPPEDA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- 2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.

- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD**

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

### **BAB V : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPPEDA**

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai realisasi terhadap capaian program-program pembangunan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 9 program yang terdiri dari 26 kegiatan, sementara pada tahun 2020, BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 10 program dengan 28 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun 2019 memuat pencapaian target kinerja tahun 2019 berdasarkan rencana kerja tahun 2019. Sementara, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun 2020 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Bappeda menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja BAPPEDA pada tahun 2019 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2020) disajikan pada Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 di bawah ini:

<p style="text-align: center;"><b>Tabel 2.1.1. (T-C.29)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2020</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat</b></p>										
<b>No.</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2021</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019</b>			<b>Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020</b>	<b>Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2020</b>	
					<b>Target Renja OPD Tahun 2019</b>	<b>Realisasi Renja OPD Tahun 2019</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10 (5+7+9)</b>	<b>11 (10/4)</b>
<b>1</b>	Program Perencanaan Pembangunan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100%	69,09%	80%	75%	93,75	100%	100%	100%
<b>2</b>	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan sesuai regulasi	100%	62,07%	100%	75%	93,75	100%	100%	100%
<b>3</b>	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi III RPJMD	95%	89,3%	90%	86,7%	96,33%	91%	91%	96%
<b>4</b>	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi I RPJMD	95%	78%	90%	75,71%	84,12%	93%	93%	98%
		Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi II RPJMD	90%	41%	57,50%	94,73%	164,75 %	73,75%	73,75%	82%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2020	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi IV RPJMD	95%	42%	60%	88,26%	147,1%	70%	70%	74%
		Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi V RPJMD	95%	75%	85%	97,5%	114,71	90%	90%	95%
5	Program Perencanaan Pembangunan PWSDA	Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi VI RPJMD	89,40%	80,01%	86,29%	80,10%	92,83%	87%	87%	97%
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah	100%	60%	80%	70%	87,5%	80%	80%	80%
		Jumlah kajian litbang yang ditindak lanjuti	18 Rekom	4 Rekom	4 Rekom	2 Rekom	50%	4 Rekom	10 Rekom	55,56%

<b>7</b>	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi keuangan dan fisik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100,00 %
<b>No.</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2021</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019</b>			<b>Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020</b>	<b>Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2020</b>	
					<b>Target Renja OPD Tahun 2019</b>	<b>Realisasi Renja OPD Tahun 2019</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisas i Capaian</b>	<b>Tingkat Capaia n</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10 (5+7+9)</b>	<b>11 (10/4)</b>
<b>8</b>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	90,98%	100%	96,67	96,67	100%	100%	100,00 %
<b>9</b>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	99,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
<b>10</b>	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100%	92%	100%	95%	95%	100%	100%	100,00 %

**Tabel 2.1.2.**  
**Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2019**

INDIKATOR KINERJA		Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
<b>I Program Perencanaan Pembangunan</b>				
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 Dok	1 Dok	100
2	Penyusunan RKPD	2 Dok	2 Dok	100
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	100
4	Fasilitasi dan Pelatihan e-planning dan e-budgeting	100%	100%	80
<b>II Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>				
5	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	100%	100
6	Kajian perencanaan kawasan perdesaan	1 Dok	1 Dok	100
<b>III Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>				
7	Kooordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	100%	100%	100
8	Koordinasi TKPK Kab. Pasaman Barat	1 Dok	1 Dok	100
9	Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak	1 Tim Pembina	1 Tim Pembina	95
10	Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dok	1 Dok	100
11	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pelaporan SDGs	1 Dok	1 Dok	95
<b>IV Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>				
12	Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemukiman Kab. Pasaman Barat	1 Dok	1 Dok	92
13	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang PWSDA	100%	100%	100
14	Fasilitasi Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project)	5 Dok/Lap	5 Dok/Lap	98
15	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1 Dok	1 Dok	95
<b>V Program Pengembangan Data/Informasi</b>				
16	Penyusunan Profil Daerah	4 Dok	4 Dok	75

	17	Pemantapan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)	5%	5%	15
	18	Koordinasi Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100
	19	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)	1 Buku	1 Buku	100
	20	Sistem Inovasi Daerah	3 Kali	3 Kali	100
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
	21	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	55 Orang	55 Orang	100
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
	22	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	16 Orang	16 Orang	95
<b>VIII</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	23	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	95
	24	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	71 Unit/Paket	71 Unit/Paket	95
	25	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	100%	100
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	26	Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin	67 Unit/Paket	67 Unit/Paket	100

Berdasarkan Tabel 2.1.1. dan 2.1.2. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 program teknis dan 3 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 26 kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 3 sasaran dengan 6 indikator sesuai Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016-2021, yaitu :

**Tabel 2.1.3.**  
**Penilaian Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Predikat
<b>1</b>	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	80%	75%	93,75	<b>Baik</b>
<b>2</b>	Persentase capaian IKU daerah	100%	89,33	89,33	<b>Cukup</b>

					<b>Baik</b>
<b>3</b>	Persentase capaian target kinerja RKPD	100%	89,33	89,33	<b>Cukup Baik</b>
<b>4</b>	Peningkatan nilai SAKIP	CC	B	66,67	<b>Sedang</b>
<b>5</b>	Level Maturitas SPIP	3	2	66,67	<b>Sedang</b>
<b>6</b>	<b>Opini terhadap Laporan Keuangan</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	-	-

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan perubahan peraturan Bupati No. 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja BAPPEDA, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, statistik, dan penelitian meliputi :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penyusunan program pembangunan daerah;
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan, statistik, dan penelitian;
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada perubahan RPJMD tahun 2016-2021, BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi V RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan satu tujuan strategis pembangunan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, yakni :

**Tabel 2.2.1.**  
**Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2016-2021**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan Misi</b>	<b>Sasaran Misi</b>	<b>Tujuan BAPPEDA</b>
<b>Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>	Reformasi birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran
			<b>Indikator :</b> Percentase pencapaian target kinerja RPJMD

*Sumber : BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018*

Uraian tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala BAPPEDA yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA tahun 2016-2021. Pengukuran pencapaian target kinerja BAPPEDA Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2020 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2020 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

**Tabel 2.2.2. (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kab. Pasaman Barat**

No.	Indikator	SPM / IKK		Target Renstra BAPPEDA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Nasional	Standar	Tahun 2019	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2018	Tahu n 2019	Tahu n 2021	Tahu n 2022	
1	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik			80%	100%	100%	100%	69,09 %	75%	100%	100%	
2	Persentase capaian IKU daerah			100%	100%	100%	100%	96,38 %	88,89	100%	100%	
3	Persentase capaian target kinerja RKPD			100%	100%	100%	100%	96%	88,89	100%	100%	
4	Peningkatan nilai SAKIP			B	B	B	B	CC	CC	B	B	
5	Level Maturitas SPIP			3	3	3	3	3	2	3	3	
6	Opini terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

- 1) Upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan penataan ruang melalui ketetapan terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
- 2) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan (sesuai aturan yang berlaku, selaras dan sinkron antar dokumen perencanaan lainnya)
- 3) Optimalisasi penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang memadai melalui penyediaan dokumen statistik dan penelitian yang berkualitas.
- 4) Fasilitasi dan penyediaan sarana sosialisasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah melalui penguatan Dewan Riset Daerah.
- 5) Peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM perencanaan daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 6) Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang daerah melalui penerapan teknologi informasi yang tepat.

BAPPEDA berperan sebagai koordinator dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya karena keterbatasan SDM dan APBD serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

1. Masih ditemukan kegiatan yang muncul di Renja OPD namun tidak terdapat dalam kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Akibatnya, beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan pengalokasian anggaran karena dinilai tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan/atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

2. Masih ditemukan kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. Masih rendahnya hasil Musrenbang RKPD yang dapat diakomodir (kurang dari 30%) akibat berbagai kendala seperti, tidak terpenuhinya persyaratan teknis, tidak sesuaiannya usulan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan daerah, hingga komitmen OPD yang masih rendah untuk mengakomodir usulan masyarakat tersebut.
4. Adanya usulan/kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan karena keterbatasan APBD.
5. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam Renstra dan Renja OPD.

#### **2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD**

BAPPEDA Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 6.702.467.350,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*)** untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2021. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 4 program (teknis dan rutin), 15 Kegiatan dan 40 sub kegiatan yang direncanakan.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.4. (T-C.31)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Pasaman Barat**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Penjelasan)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>4,656.751.381</b>				<b>4,656.751.381</b>		
1)	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	<b>Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah</b>		<b>33.717.500</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah</b>		<b>33.717.500</b>		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat			<b>22.040.000</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah			<b>22.040.000</b>		
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat			<b>11.677.500</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			<b>11.677.500</b>		
2)	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>3.727.081.808</b>		<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>3.727.081.808</b>		
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan		3,499,726,808	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan		3,499,726,808		
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran		160.905,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran		160.905,000		
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan		66,450,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan		66,450,000		

<b>3)</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>BAPPEDA Kab. Pasman Barat</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>51,850,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>51,850,000</b>	
<b>6.</b>	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada BAPPEDA		29.400,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada BAPPEDA		29.400,000	
<b>7.</b>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah THL Penatausahaan Barang Milik Daerah		25.450,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah THL Penatausahaan Barang Milik Daerah		25.450,000	
<b>4)</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BAPPEDA Kab. Pasman Barat</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>148.827.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>148.827.000</b>	
<b>8.</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)		29.192.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)		29.192.000	
<b>9.</b>	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		95.000,000	Sosialisasi Peraturan-Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		95.000,000	
<b>10.</b>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai		24.635.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai		24.635.000	
<b>5)</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BAPPEDA Kab. Pasman Barat</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>241.803.823</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>241.803.823</b>	

11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor		3.811,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor		3.811,500	
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah ATK yang dibutuhkan		29.997.080	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan		29.997.080	
13.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih		7.028.243	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih		7.028.243	
14.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Bappeda yang dibutuhkan		21.802,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Bappeda yang dibutuhkan		21.802,000	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti		179,165,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti		179,165,000	
6)	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BAPPEDA Kab. Pasman Barat</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>82.500,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		<b>82.500,000</b>	
16.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor		<b>27.500,000</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor		<b>27.500,000</b>	
17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dibangun/ rehab		<b>55.000.0000</b>	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dibangun/ rehab		<b>55.000.0000</b>	

7)	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	<b>terpenuhinya kegiatan penunjang Persentase operasional perangkat daerah</b>		120,262,500	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>terpenuhinya kegiatan penunjang Persentase operasional perangkat daerah</b>		120,262,500	
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor		102,012.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor		102,012.500	
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor		18,250,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor		18,250,000	
8)	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		247.708.750	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>		247.708.750	
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan		210.091.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan		210.091.250	
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasman Barat	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara		37.617.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara		37.617.500	
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				663.871.856	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			663.871.856	

<b>9)</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Kab. Pasaman Barat	<b>persentase kualitas perencanaan bernilai baik</b>		<b>638.239.656</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>persentase kualitas perencanaan bernilai baik</b>		<b>638.239.656</b>	
<b>22.</b>	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen usulan kegiatan yang didanai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi		61,000,000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen usulan kegiatan yang didanai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi		61,000,000	
<b>23.</b>	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil forum perangkat daerah		5,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil forum perangkat daerah		5,000,000	
<b>24.</b>	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kabupaten		30,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kabupaten		30,000,000	
<b>25.</b>	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan		18,800,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan		18,800,000	
<b>26.</b>	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2022-2026 dan RKPD Tahun 2022 beserta Perubahan		<b>523.439.656</b>	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2022-2026 dan RKPD Tahun 2022 beserta Perubahan		<b>523.439.656</b>	
<b>10)</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Kab. Pasaman Barat	<b>persentase kualitas perencanaan bernilai baik</b>		<b>25.632.200</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>25.632.200</b>	
<b>27.</b>	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2021		25.632.200	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2021		25.632.200	
<b>III</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>934.744.523</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			<b>934.744.523</b>	

RENCANA KERJA TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

						<b>DAERAH</b>				
11)	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Pasaman Barat	<b>Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik</b>		287.470.750	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<b>Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik</b>		287.470.750	
28.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Kab. Pasaman Barat	Persentase OPD Lingkup Bidang Sosial Budaya yang menyusun perencanaan dengan baik		51.691.350	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Persentase OPD Lingkup Bidang Sosial Budaya yang menyusun perencanaan dengan baik		51.691.350	
29.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pasaman Barat	Frekuensi Monev SLRT yang difasilitasi Frekuensi Pelaksanaan Evaluasi Jorong Tertinggal Frekuensi Rakor TKPD yang difasilitasi Jumlah Dokumen LP2KD yang disusun Jumlah Profil Ketertinggalan yang disusun		57.618.300	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Frekuensi Monev SLRT yang difasilitasi Frekuensi Pelaksanaan Evaluasi Jorong Tertinggal Frekuensi Rakor TKPD yang difasilitasi Jumlah Dokumen LP2KD yang disusun Jumlah Profil Ketertinggalan yang disusun		57.618.300	
30.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan bidang sosial budaya yang disusun		13.583.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan bidang sosial budaya yang disusun		13.583.000	
31.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Kab. Pasaman Barat	Data Majemen Stunting (Aksi 6) Dokumen Analisis Situasi (Aksi 1) Dokumen RAD		99.790.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Data Majemen Stunting (Aksi 6) Dokumen Analisis Situasi (Aksi 1) Dokumen RAD PUG		99.790.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

			PUG Dokumen Rencana Kerja (Aksi 2) Pengelolaan Aplikasi SISTER Terlaksananya Rembuk Stunting (Aksi 3)		RPJMD dan RKPD)	Dokumen Rencana Kerja (Aksi 2) Pengelolaan Aplikasi SISTER Terlaksananya Rembuk Stunting (Aksi 3)		
32.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Pasaman Barat	Dokumen Review Kinerja (Aksi 8) Pelaporan 8 Aksi Konvergensi secara lengkap Pelaporan Aksi PUG Terlaksananya Monev PUG	64.788.100	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Review Kinerja (Aksi 8) Pelaporan 8 Aksi Konvergensi secara lengkap Pelaporan Aksi PUG Terlaksananya Monev PUG	64.788.100	
12)	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik</b>	<b>459,823,773</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik</b>	<b>459,823,773</b>	
33.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	40,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	40,000,000	
34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang dilakukan penelusuran jaringan jumlah pelaksanaan rapat monitoring Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan(sosialisasi PPSI, Rapat Komir, FGD)	419,823,773	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang dilakukan penelusuran jaringan jumlah pelaksanaan rapat monitoring Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan(sosialisasi PPSI, Rapat Komir, FGD)	419,823,773	
13)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	187,450,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	187,450,000	

<b>35.</b>	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi yang dilaksanakan		56,050,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rapat koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi yang dilaksanakan		56,050,000	
<b>36.</b>	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Pasaman Barat	Jumlah RKM dan SK Lokasi		71,400,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah RKM dan SK Lokasi		71,400,000	
<b>37.</b>	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		60,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		60,000,000	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>				<b>447.099.590</b>				<b>447.099.590</b>	
<b>14)</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah</b>		<b>321.049.765</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>321.049.765</b>	
<b>38.</b>	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		245.000.115		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	245.000.115	
<b>39.</b>	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Barudan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat / diskusi aktual Dewan Riset Daerah (DRD) yang difasilitasi Jumlah rapat / diskusi aktual Dewan Riset Daerah (DRD) yang difasilitasi		76.49.650		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Barudan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rapat / diskusi aktual Dewan Riset Daerah (DRD) yang difasilitasi	76.49.650	
<b>15)</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah</b>		<b>126.049.825</b>		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah</b>	<b>126.049.825</b>	

RENCANA KERJA TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

<b>40.</b>	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Pasaman Barat	Jumlah lomba inovasi yang diikuti		126.049.825		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah lomba inovasi yang diikuti	126.049.825
	<b>Jumlah</b>				<b>6.702.467.350</b>				<b>6.702.467.350</b>

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat**

Mengingat tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka BAPPEDA Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN OPD**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam nawacita pemerintah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, yakni sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa prioritas RPJMD pada kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.
2. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi.
9. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2021 tertuang pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1.  
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi  
Kabupaten Pasaman Barat**

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
I	<b>Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</b>	1. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis	1. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri, dan kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan budidaya perikanan</li> <li>• Program pengembangan perikanan tangkap</li> <li>• Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</li> <li>• Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</li> <li>• Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</li> <li>• Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</li> <li>• Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</li> <li>• Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan produksi hasil peternakan</li> </ul>
		2. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan	2. Pemberdayaan koperasi, IKM, dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM</li> <li>• Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>• Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan</li> <li>• Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</li> <li>• Program peningkatan dan pengembangan ekspor</li> <li>• Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> </ul>
II	<b>Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan</b>	3. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	3. Penanggulangan kemiskinan pengangguran dan daerah tertinggal berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga</li> <li>• Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</li> <li>• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari/Perdesaan</li> <li>• Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</li> <li>• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Program pembinaan panti asuhan/panti jompo</li> </ul>
III	<b>SDM berkualitas dan berdaya saing</b>	4. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan 5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4. Pembangunan kualitas SDM, pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>• Program obat dan perbekalan kesehatan</li> <li>• Program pengawasan obat dan makanan</li> <li>• Program Promosi Kesehatan</li> </ul>

				<p>dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan lingkungan sehat</li> <li>• Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</li> <li>• Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</li> <li>• Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</li> <li>• Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</li> <li>• Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</li> <li>• Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>• Program Pendidikan Non Formal</li> <li>• Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas Hasil Belajar</li> <li>• Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</li> <li>• Program bantuan Operasional Sekolah</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</b>	6. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan	5. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan pemahaman, pengetahuan, pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan</li> <li>• Program Pengembangan Prestasi Keagamaan</li> <li>• Program Pengembangan Nilai Budaya</li> <li>• Program pengembangan wawasan kebangsaan</li> <li>• Program peningkatan peran</li> </ul>

		masyarakat		serta kepemudaan • Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
V	<b>Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar</b>	<p>7. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur</p> <p>8. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi</p>	<p>6. Pengembangan perdagangan, investasi, jasa pariwisata dan industri kreatif melalui peningkatan kualitas tenaga kerja</p> <p>7. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan dan pengembangan ekspor</li> <li>• Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>• Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> <li>• Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>• Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>• Program pengembangan destinasi pariwisata</li> <li>• Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>• Program pengembangan Industri Kreatif</li> <li>• Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>• Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</li> <li>• Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li> <li>• Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>• Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>• Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>• Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur</li> </ul>

				<p>Kawasan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Perumahan</li> <li>• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>• Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</li> <li>• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</li> <li>• Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</li> <li>• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</li> <li>• Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</li> <li>• Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>• Program Pengembangan Data/ Informasi</li> <li>• Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</li> <li>• Program kerjasama informasi dengan mas media</li> </ul>
VI	<b>Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim</b>	9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	8. Pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan Tata Ruang</li> <li>• Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>• Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>• Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>• Program peningkatan pengendalian polusi</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengembangan kinerja pengelolaan</li> </ul>

				<p>persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</li> <li>• Program Peningkatan Kelembagaan Kebencanaan</li> <li>• Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana</li> <li>• Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam</li> <li>• Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana</li> </ul>
VII	<b>Stabilitas Polhukham dan transformasi pelayanan publik</b>	<p>10. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan</p>	<p>9. Penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat</p> <p>10. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</li> <li>• Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal</li> <li>• Program pendidikan politik masyarakat</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penataan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</li> <li>• Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</li> <li>• Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</li> </ul>

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran berikut indikator yang ingin dicapai BAPPEDA Tahun 2021 dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**Renja BAPPEDA Tahun 2021**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran	Persentase pencapaian target kinerja RPJMD	1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik
			2.	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Persentase capaian IKU daerah
			3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan nilai SAKIP Level Maturitas SPIP Opini terhadap Laporan Keuangan

### 3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab terhadap keselarasan program-program pembangunan daerah di seluruh OPD yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Secara umum, rencana program dan kegiatan BAPPEDA Pasaman Barat Tahun 2021 tertuang kedalam 4 program dengan 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019).

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2021 merupakan implementasi tahun ke-6 Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Prioritas Pembangunan diterjemahkan ke dalam 3 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BAPPEDA, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan BAPPEDA Kab. Pasaman Barat Tahun 2019 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 4 program (teknis dan rutin), 15 Kegiatan dan 40 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kab. Pasman Barat pada tahun 2021 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 6.702.467.350,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)**sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 disajikan pada table 4.1. dan Tabel 4.2.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	1				PERENCANAAN										6.702.467.350				7.068.066.052						
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4.656.751.381				4.801.252.648						
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										33.717.500				3.630.000						
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah		sa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0		4 tess	22.040.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	1.870.000							
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah		sa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0		4 tess	11.677.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	1.760.000							
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.727.081.808				3.954.026.148						
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31 orang		3.499.726.808	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	3.674.713.148							
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 PTT 8 THL		160.905.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	209.590.500							
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan		66.450.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	69.722.500							
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										54.850.000				57.062.500						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada BAPPEDA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 THL		29.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	34.347.500	
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah THL Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 PNS 1 THL		25.450.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	22.715.000	
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							148.827.000					159.500.000	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang		29.192.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	33.000.000	
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 Orang		95.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	104.500.000	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 orang		24.635.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	22.000.000	
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							241.803.823					260.635.000	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket		3.811.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	4.950.000	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket		29.997.080	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	33.000.000	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket		7.028.243	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	7.800.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Bappeda yang dibutuhkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket		21.802.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	17.985.000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 kali 12 kali		179.165.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	196.900.000
5	1	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>82.500.000</b>					<b>33.000.000</b>
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit		27.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	33.000.000
5	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dibangun/ rehab		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkung Aua	100%	1 Unit		55.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	-
5	01	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>120.262.500</b>					<b>132.275.000</b>
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan		102.012.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	112.200.000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 THL 12 kali		18.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	20.075.000
5	1	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>247.708.750</b>					<b>201.124.000</b>
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 unit 2 Orang		210.091.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	167.101.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 unit		37.617.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	34.023.000
5	1	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>									<b>663.871.856</b>				<b>671.935.000</b>
5	1	2	2.01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>									<b>638.239.656</b>				<b>649.935.000</b>
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	persentase kualitas perencanaan bermilai baik	Jumlah dokumen usulan kegiatan yang didanai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen		61.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		persentase kualitas perencanaan bermilai baik	100 %	67.100.000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	persentase kualitas perencanaan bermilai baik	Jumlah dokumen hasil forum perangkat daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen		5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		persentase kualitas perencanaan bermilai baik	100 %	5.500.000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	persentase kualitas perencanaan bermilai baik	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen		30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		persentase kualitas perencanaan bermilai baik	100 %	33.000.000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	persentase kualitas perencanaan bermilai baik	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen		18.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		persentase kualitas perencanaan bermilai baik	100 %	20.680.000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	persentase kualitas perencanaan bermilai baik	Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2022-2026 dan RKPD Tahun 2022 beserta Perubahan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen		523.439.656	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		persentase kualitas perencanaan bermilai baik	100 %	523.655.000
5	1	2	2.03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>									<b>25.632.200</b>				<b>22.000.000</b>
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase kualitas perencanaan bermilai baik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2021		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan		25.632.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		persentase kualitas perencanaan bermilai baik	100 %	22.000.000
5	1	3			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>									<b>934.744.523</b>				<b>1.035.466.150</b>
5	1	3	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>									<b>287.470.750</b>				<b>323.465.000</b>
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Persentase OPD Lingkup Bidang Sosial Budaya yang menyusun perencanaan dengan baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		51.691.350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	45.155.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Frekuensi Monev SLRT yang difasilitasi Frekuensi Pelaksanaan Evaluasi Jorong Tertinggal Frekuensi Rakor TKPD yang difasilitasi Jumlah Dokumen LP2KD yang disusun Jumlah Profil Ketertinggalan yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kali 1 kali 3 kali 1 buku 1 buku		57.618.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	51.655.000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan bidang sosial budaya yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen		13.583.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	33.000.000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Data Majemen Stunting (Aksi 6) Dokumen Analisis Situasi (Aksi 1) Dokumen RAD PUG Dokumen Rencana Kerja (Aksi 2) Pengelolaan Aplikasi SISTER Terlaksananya Rembuk Stunting (Aksi 3)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 aplikasi 1 dokumen		99.790.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	111.155.000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Dokumen Review Kinerja (Aksi 8) Pelaporan 8 Aksi Konvergensi secara lengkap Pelaporan Aksi PUG Terlaksananya Monev PUG		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 100 % 4 kali 4 kali		64.788.100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	82.500.000
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								459.823.773					505.806.150
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 rapat		40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	44.000.000
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang dilakukan penelusuran jaringan Jumlah pelaksanaan rapat monitoring Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan(sosialisasi PPSI, Rapat Komir, FGD)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Daerah Irigasi 3 kali 10 kali		419.823.773	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	461.806.150

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
5	1	3	2.03	Tolok Ukur	Target				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya							187.450.000					206.195.000	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah rapat koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kali		56.050.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	61.655.000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah RKM dan SK Lokasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 lokasi		71.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	78.540.000
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali		60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100 %	66.000.000
5	5				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								447.099.590					559.412.254
5	5	2			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>								447.099.590					559.412.254
5	5	2	2.01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>								321.049.765					420.757.254
5	05	02	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah	Jumlah Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dok		245.000.115	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah		337.102.254
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah	Jumlah rapat / diskusi aktual Dewan Riset Daerah (DRD) yang difasilitasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 kali		76.049.650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah	100 %	83.655.000
5	5	2	2.04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>								126.049.825					138.655.000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah	Jumlah lomba inovasi yang diikuti		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kali		126.049.825	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah	100 %	138.655.000
<b>TOTAL</b>												<b>6.702.467.350</b>					<b>6.765.118.798</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2021. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan satu tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Simpang Empat, 10 Juli 2020  
**Kepala BAPPEDA**  
**Kabupaten Pasaman Barat**



**Drs. Joni Hendri, M.Si**  
**NIP. 19751007 199501 1 001**